

Turnitin Class

300 ~ 311 - ID 1111 - Similarity Check

 DRAFT_01

 Quick Submit.

 Universidade Federal do Oeste do Pará - Docentes

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3679864283

Submission Date

Oct 15, 2026, 3:33 AM GMT-3

Download Date

Oct 15, 2026, 3:34 AM GMT-3

File Name

300_311_-_ID_1111_-_Similarity_Check.pdf

File Size

274.9 KB

12 Pages

4,782 Words

33,121 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 13%  Internet sources
 - 7%  Publications
 - 4%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 13% Internet sources
- 7% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.untan.ac.id	2%
2	Student papers	Universitas Gadjah Mada	2%
3	Internet	fahruddin.org	1%
4	Internet	repository.unmuhpnk.ac.id	1%
5	Internet	jurnal.unpkediri.ac.id	<1%
6	Internet	e-journalppmunsa.ac.id	<1%
7	Internet	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
8	Internet	jurnal.pknstan.ac.id	<1%
9	Internet	www.journals.gesociety.org	<1%
10	Internet	repository.nusaputra.ac.id	<1%
11	Internet	www.coursehero.com	<1%

12	Publication	Juli Indah Sari Gurning, Monica Manurung, Ardin Dolok Saribu, Arya Belfriani S et ...	<1%
13	Internet	journals.polimaritimekautama.ac.id	<1%
14	Internet	pdfcoffee.com	<1%
15	Internet	123dok.com	<1%
16	Internet	publication.uniku.ac.id	<1%
17	Internet	ar.mian.fisip-unmul.ac.id	<1%
18	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
19	Internet	www.atlantis-press.com	<1%
20	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta	<1%
21	Internet	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id	<1%
22	Internet	pateron.blogspot.com	<1%
23	Internet	www.manuelgarcia.designrshub.com	<1%
24	Internet	bilselkongreleri.com	<1%
25	Internet	dergipark.org.tr	<1%

26	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
27	Internet	ejournal.iwi.or.id	<1%
28	Internet	jise.uniku.ac.id	<1%
29	Internet	journal.untidar.ac.id	<1%
30	Internet	repository.ekuitas.ac.id	<1%
31	Internet	repository.upy.ac.id	<1%
32	Internet	www.journal.staisar.ac.id	<1%
33	Internet	www.scribd.com	<1%
34	Publication	Dining Nika Alina, Ahmad Hambali, Umar Abdurrahman, Ismail Maqbul, Ernawati...	<1%
35	Publication	Rachimi ., Farida ., Hidayatullah .. "PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP ...	<1%

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BLUE ACCOUNTING IN SUPPORTING ACCOUNTABILITY OF MARINE RESOURCE MANAGEMENT IN WEST KALIMANTAN

Haini Rastika^{1*}, Helisa Noviarty², Ira Grania Mustika³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Tanjungpura, Indonesia
b1031231190@student.untan.ac.id^{1*}, helisa.noviarty@ekonomi.untan.ac.id²,
ira.grania.m@student.untan.ac.id³

*Corresponding author

Received September 19, 2026; Revised October 8, 2026; Accepted October 15, 2026; Published October 20, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of blue accounting in supporting accountability for marine resource management at the Marine and Fisheries Agency of West Kalimantan Province. The study employs a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. Data were collected through in-depth interviews with three informants, observation, and documentation. Informants were selected based on their direct involvement in financial management and the management of marine and coastal ecosystems. Data were analyzed using thematic analysis and triangulated based on the findings from interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of blue accounting is still in its early stages and has not yet been fully integrated into financial management and marine resource reporting. The accounting system used adheres to accrual-based Government Accounting Standards (SAP) but does not yet incorporate the economic and ecological values of marine resources into financial reporting. Key challenges include limited data availability, insufficient human resource capacity, the absence of specific policies and regulatory frameworks, limited information system integration, and budgetary constraints. Costs associated with environmental protection and restoration are still recorded under general operational activities. Despite these limitations, blue accounting has the potential to strengthen transparency and accountability by integrating financial, economic, and ecological information into marine resource management.

Keywords: Accountability, blue accounting, environmental accounting, marine resources, public sector.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya kelautan yang besar, meliputi perikanan, ekosistem pesisir, pariwisata bahari, dan berbagai aktivitas maritim. Sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi dan sosial, sedangkan keberlanjutannya bergantung pada pengelolaan yang efektif dengan menyeimbangkan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Di Kalimantan Barat, kegiatan kelautan dan perikanan memiliki arti strategis bagi masyarakat pesisir dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan informasi yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Namun, pengelolaan sumber daya kelautan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran wilayah pesisir, fragmentasi data, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Riesnandar dan Nuhartonosuro (2025) mengidentifikasi bahwa implementasi blue economy di Indonesia masih



This is an open access article under the Attribution 4.0 International License.

Copyright ©2026 by COUNT: Journal of Accounting, Business and Management. Published by Fahr Publishing.

300

menghadapi keterbatasan pemanfaatan teknologi, ketimpangan penerapan prinsip keberlanjutan di wilayah pesisir, serta kebutuhan penguatan edukasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pelaporan sektor publik yang ada cenderung menekankan transaksi keuangan, anggaran, dan kegiatan operasional, sementara informasi mengenai kondisi, nilai ekonomi, dan konsekuensi ekologis sumber daya kelautan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan lembaga pemerintah dalam menunjukkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan secara komprehensif.

Blue accounting atau ocean accounting menawarkan pendekatan untuk menghubungkan informasi ekonomi dan lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya kelautan dan pesisir. Kerangka tersebut dapat mengorganisasi informasi fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga perubahan sumber daya kelautan, jasa ekosistem, dan aktivitas manusia dapat dipertimbangkan secara bersama dalam proses kebijakan dan akuntabilitas. Penelitian ocean accounting terkini menekankan kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung tata kelola kelautan yang berkelanjutan (Gacutan, Galparsoro, et al., 2022; Gacutan et al., 2023; Ekawati et al., 2025).

Blue accounting berkaitan erat dengan akuntansi ekonomi-lingkungan karena berupaya menggambarkan interaksi antara ekosistem laut, kegiatan ekonomi, dan masyarakat. Kegunaannya tidak terbatas pada pencatatan pengeluaran keuangan, tetapi juga dapat mendukung identifikasi kondisi sumber daya, jasa ekosistem, tekanan lingkungan, serta biaya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan. Dalam sektor publik, penelitian mengenai akuntansi lingkungan menunjukkan bahwa penerapannya masih terbatas dan dipengaruhi oleh regulasi, ketersediaan data, kapasitas kelembagaan, serta integrasi informasi lingkungan ke dalam sistem administrasi (Rahmawati et al., 2024; Tommasetti et al., 2023).

Berdasarkan perspektif tata kelola, blue accounting dapat mendukung akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dengan membuat informasi mengenai pengelolaan sumber daya kelautan menjadi lebih komprehensif. Blue accounting juga dapat berkontribusi terhadap legitimasi organisasi karena lembaga publik diharapkan mampu menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir, Aptasari (2025) menekankan pentingnya transparansi informasi dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui pendekatan akuntansi dialogis, sekaligus mengidentifikasi ketimpangan akses informasi dan dominasi kebijakan dari atas sebagai hambatan bagi tata kelola yang partisipatif. Penelitian ocean accounting juga menunjukkan bahwa ukuran ekonomi saja belum cukup untuk menggambarkan dimensi sosial, budaya, dan ekologis dalam pengelolaan laut (Kotze & Bohler-Muller, 2024; Hartmann & Thornton, 2025).

Penelitian mengenai *blue accounting* dan *ocean accounting* di Indonesia terus berkembang, tetapi penelitian empiris yang mengkaji penerapannya dalam lembaga pemerintah daerah masih terbatas. Suwarno et al. (2025) membahas peran akuntansi biru

23 dalam mendukung pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan di Indonesia. Penelitian yang ada umumnya membahas *ocean accounting* sebagai instrumen untuk mengintegrasikan data kelautan, mengoordinasikan kebijakan, serta mendukung perikanan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan (Larre et al., 2025; Rizqiya et al., 2025; Sulistiyanto et al., 2025). Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa penerapan membutuhkan pengaturan kelembagaan, integrasi data, dan koordinasi antara pemerintah dengan aktor lainnya (Gacutan, Galparsoro, et al., 2022; Nguyen, 2024).

35
1 Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya bukti empiris mengenai bagaimana blue accounting benar-benar diterapkan dalam lembaga pemerintah daerah yang menangani kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini berfokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat serta mengkaji praktik penerapan, kendala kelembagaan, dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Kebaruan penelitian terletak pada fokus empiris terhadap kesenjangan integrasi antara kegiatan kelautan dan lingkungan yang telah dilaksanakan dengan sistem akuntansi, pengukuran, dan pelaporan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

21 30 Penelitian ini juga menggunakan perspektif pemangku kepentingan dan legitimasi. Sumber daya kelautan berdampak pada pemerintah, masyarakat pesisir, pelaku ekonomi, dan pemangku kepentingan lainnya; oleh karena itu, akuntabilitas seharusnya tidak hanya terbatas pada kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang relevan mengenai kondisi sumber daya dan keberlanjutannya. Perspektif legitimasi memperkuat pentingnya informasi lingkungan yang transparan dalam mempertahankan kepercayaan publik. Perspektif tersebut sejalan dengan pembahasan terkini mengenai tata kelola biru yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi adaptif dalam pengelolaan kelautan (Yanto et al., 2026).

4 Penelitian terdahulu menunjukkan potensi *ocean accounting* dalam mengintegrasikan informasi ekonomi dan ekologis, tetapi penerapannya tidak berlangsung secara otomatis. Sebagai contoh, Gacutan, Lal, et al. (2022) menunjukkan bagaimana *ocean accounting* dapat menghubungkan jasa ekosistem dan manfaat ekonomi, sedangkan Gacutan et al. (2023) mengusulkan model sistem dan aliran untuk menghubungkan metrik lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian tersebut memberikan dasar konseptual yang penting, tetapi belum secara langsung menggambarkan penerapan blue accounting pada instansi kelautan dan perikanan tingkat provinsi di Kalimantan Barat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menganggap keberadaan program lingkungan sebagai bukti bahwa blue accounting telah diterapkan. Penerapan dinilai berdasarkan sejauh mana informasi sumber daya kelautan, kegiatan lingkungan, informasi keuangan, pengukuran, dan pelaporan saling terhubung dalam proses akuntansi kelembagaan. Pembedaan ini penting karena suatu instansi dapat telah melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi, tetapi masih belum memiliki mekanisme akuntansi terintegrasi untuk mengidentifikasi implikasi ekonomi dan ekologisnya.

5 Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan blue accounting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan sumber daya

1 kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk hambatan kelembagaan dan kondisi yang diperlukan untuk pengembangan penerapan lebih lanjut. Tujuan khusus penelitian adalah mengidentifikasi bagaimana informasi keuangan dan sumber daya kelautan saat ini dikelola, mengkaji integrasi informasi ekologis ke dalam pelaporan, serta merumuskan implikasi praktis untuk memperkuat akuntabilitas.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian akuntansi lingkungan pada sektor publik melalui bukti empiris dari instansi kelautan dan perikanan daerah. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, identifikasi biaya lingkungan, dan pelaporan akuntabilitas. Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi kelautan dan perikanan atau pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan informasi sumber daya kelautan ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan sektor publik.

11 METODE PENELITIAN

1 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Blue Accounting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan pada Kantor Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika serta kompleksitas fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah (natural setting), serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan interpretasi dari informan (Sugiyono, 2013).

29 Penelitian melibatkan tiga informan, yaitu: (1) staf yang bertanggung jawab pada bidang keuangan, (2) staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, dan (3) staf fungsional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan akses terhadap informasi mengenai pelaporan keuangan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penerapan Blue Accounting, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi instansi dan literatur ilmiah terkait. Metode pengumpulan data ini juga digunakan dalam penelitian Blue Accounting sebelumnya yang menekankan pentingnya observasi dan dokumentasi dalam memahami praktik akuntansi lingkungan secara nyata. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan pemahaman aparatur, kebijakan dan regulasi, integrasi informasi keuangan dan ekologis, serta kendala penerapan blue accounting. Byrne (2022) menjelaskan bahwa analisis tematik reflektif melibatkan proses pengenalan data, penyusunan kode awal, pengembangan dan peninjauan tema, pendefinisian tema, serta

penyusunan hasil analisis yang dapat dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Penelitian dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Data diperoleh dari tiga informan dan diperiksa silang dengan hasil observasi dan dokumentasi. Untuk menjaga keterlacakan, informan diberi kode I1 (staf keuangan), I2 (staf pengelola ekosistem laut dan pesisir), dan I3 (staf fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir). Temuan berikut disajikan berdasarkan tema dan didukung oleh kesesuaian antara bukti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sistem pelaporan serta pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan oleh dinas.

Temuan pertama berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia. Blue accounting masih dipandang sebagai konsep yang relatif baru dan belum diterjemahkan ke dalam prosedur teknis yang seragam untuk mengakui, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi sumber daya kelautan dan lingkungan. I1 menjelaskan bahwa konsep tersebut dipahami dalam kaitannya dengan keuangan dan pengelolaan lingkungan, tetapi mekanisme teknis penerapannya belum terbentuk dengan baik. I2 dan I3 juga menunjukkan bahwa konsep tersebut masih tergolong baru, meskipun sebelumnya telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan kelautan. Hasil observasi dan telaah dokumen juga belum menemukan prosedur akuntansi khusus yang mengintegrasikan informasi keuangan dan ekologis. Temuan ini sejalan dengan literatur akuntansi lingkungan sektor publik yang mengidentifikasi kapasitas kelembagaan dan kesiapan implementasi sebagai kondisi penting dalam penerapan akuntansi lingkungan (Rahmawati et al., 2024; Tommasetti et al., 2023).

Temuan kedua berkaitan dengan kebijakan dan regulasi. Instansi belum memiliki kebijakan atau regulasi teknis khusus yang mengatur blue accounting. Program kelautan dan lingkungan dilaksanakan melalui program sektoral dan anggaran yang telah ada, tetapi belum terdapat kerangka khusus untuk mengakui, mengukur, mencatat, dan melaporkan nilai sumber daya kelautan serta biaya lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian ocean accounting terkini yang mengidentifikasi pengaturan regulasi dan kelembagaan sebagai persyaratan penting dalam penerapan (Nguyen, 2024; Larre et al., 2025).

17 Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *blue accounting* di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat masih berada pada tahap awal dan belum diterapkan secara menyeluruh, baik dalam sistem pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya kelautan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa konsep *blue accounting* masih tergolong baru sehingga pemahaman aparatur mengenai konsep tersebut masih terbatas pada pengelolaan lingkungan dan keuangan daerah secara umum. Informan dari bagian keuangan menjelaskan bahwa *blue accounting* dipahami sebagai konsep yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan lingkungan, tetapi pemahaman mengenai mekanisme dan implementasinya masih belum mendalam. Hal serupa disampaikan oleh staf pengelola ekosistem laut dan pesisir yang menyatakan bahwa

konsep tersebut masih relatif baru meskipun sebelumnya pernah memperoleh pelatihan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pemahaman sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerapan *blue accounting*. Rendahnya pemahaman aparatur menyebabkan konsep *blue accounting* belum diterjemahkan ke dalam prosedur pengelolaan dan pelaporan yang secara khusus mengintegrasikan informasi keuangan dengan informasi ekologis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Hadi (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *blue accounting* di sektor publik. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi mengenai akuntansi lingkungan dan sumber daya kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi konsep tersebut.

Dari aspek kebijakan dan regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki kebijakan resmi maupun regulasi khusus yang mengatur penerapan *blue accounting*. Belum tersedianya pedoman teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan sumber daya serta biaya lingkungan menyebabkan penerapan *blue accounting* belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan masih dilakukan berdasarkan program dan kegiatan sektoral yang tersedia, belum berdasarkan suatu sistem akuntansi kelautan yang terintegrasi. Dalam aspek sistem akuntansi, seluruh informan menyampaikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan oleh dinas telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sistem tersebut digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, laporan yang dihasilkan masih berorientasi pada penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan. Informasi mengenai nilai ekonomi sumber daya kelautan, kondisi ekologis wilayah laut, serta perubahan kualitas ekosistem belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian, sistem akuntansi yang diterapkan telah memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan *blue accounting* yang menghubungkan aspek ekonomi, keuangan, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan. Dalam perspektif *blue accounting*, informasi mengenai sumber daya laut tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi atau penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup kondisi dan nilai sumber daya alam yang dikelola pemerintah. Oleh karena itu, integrasi informasi ekologis dan ekonomi diperlukan agar laporan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai manfaat, biaya, serta dampak pengelolaan sumber daya kelautan. Temuan ini sejalan dengan Putri, Sari, dan Hidayah (2024) yang menekankan pentingnya integrasi nilai ekonomi dan ekologis sumber daya laut dalam sistem pelaporan sebagai bagian dari pengembangan

blue accounting.

1 Pada aspek inventarisasi sumber daya kelautan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap berbagai sumber daya kelautan, seperti perikanan tangkap, mangrove, terumbu karang, dan lamun. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bidang teknis terkait sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir. Namun, inventarisasi belum dilakukan secara rutin setiap tahun karena dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta ketersediaan data pendukung. Selain itu, sebagian data terkait sumber daya lingkungan masih berada di bawah kewenangan instansi lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan data sumber daya kelautan yang terintegrasi masih terbatas. Keterbatasan inventarisasi tersebut memiliki implikasi terhadap penerapan *blue accounting*. Data mengenai jumlah, kondisi, perubahan, dan nilai sumber daya kelautan merupakan dasar yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan pelaporan secara lebih komprehensif. Apabila data ekologis tidak tersedia secara konsisten, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengukur nilai ekonomi sumber daya kelautan maupun menghitung perubahan dan kerusakan ekosistem dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme pendataan dan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan sistem *blue accounting*.

4 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat juga telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir, antara lain rehabilitasi mangrove, transplantasi terumbu karang, rehabilitasi lamun, serta konservasi wilayah pesisir. Program-program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran dinas. Namun, biaya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan lingkungan masih dicatat sebagai bagian dari kegiatan umum dan belum dipisahkan secara khusus sebagai biaya lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang memiliki karakteristik lingkungan sebenarnya telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan sistem pencatatan biaya lingkungan yang teridentifikasi secara khusus.

28 12 Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di lingkungan dinas masih bersifat parsial. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi telah menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi informasi mengenai berapa besar biaya yang dikeluarkan khusus untuk perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan belum dapat terlihat secara jelas dalam sistem pelaporan. Kondisi ini sejalan dengan Pramasita, Baridwan, dan Nurofik (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan pada organisasi sektor publik masih menghadapi kendala dalam pengidentifikasian dan pemisahan biaya lingkungan. Sebagai pembanding, Rahayu et al. (2022) menemukan bahwa biaya lingkungan pada The ONE Legian Hotel telah diidentifikasi, diakui, diukur, dan disajikan, tetapi belum diungkapkan secara terperinci dalam laporan keuangan. Dengan adanya pencatatan biaya lingkungan secara lebih terstruktur, pemerintah daerah akan lebih mudah mengevaluasi efisiensi anggaran sekaligus menunjukkan besarnya sumber daya yang dialokasikan

untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *blue accounting*, karena pengukuran nilai ekonomi sumber daya kelautan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan manfaat ekonomi sekaligus nilai ekologis dari sumber daya yang dikelola. Tanpa adanya pengukuran yang dilakukan secara berkala, perubahan nilai sumber daya kelautan serta biaya yang muncul akibat kerusakan lingkungan akan sulit ditelusuri dalam sistem pelaporan. Dengan demikian, pengembangan metode pengukuran dan penilaian ekonomi sumber daya kelautan secara berkala diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Dalam aspek kendala penerapan, hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan data, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi lingkungan, belum tersedianya sistem informasi yang mengintegrasikan data lingkungan dan data keuangan, serta keterbatasan anggaran. Keterbatasan tersebut saling berkaitan. Data lingkungan yang tidak tersedia secara rutin akan menyulitkan proses pengukuran dan pencatatan, sedangkan keterbatasan kompetensi aparatur menyebabkan data yang tersedia belum dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam informasi akuntansi. Di sisi lain, belum tersedianya sistem informasi terintegrasi menyebabkan data keuangan dan data ekologis masih dikelola secara terpisah.

Temuan tersebut mendukung penelitian Warkula, Uniberua, dan Lambyombar (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, data, dan dukungan sistem menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, penerapan *blue accounting* tidak hanya membutuhkan perubahan dalam pencatatan akuntansi, tetapi juga membutuhkan penguatan sumber daya manusia, sistem informasi, ketersediaan data, dan dukungan anggaran. Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur menjadi penting agar konsep *blue accounting* dapat dipahami secara konseptual sekaligus diterapkan dalam kegiatan operasional.

Dari sisi akuntabilitas publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah serta dipublikasikan melalui media resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban administratif dan keuangan telah berjalan. Namun, tidak seluruh informasi teknis mengenai kondisi sumber daya kelautan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Informasi mengenai kondisi ekosistem, nilai ekonomi sumber daya kelautan, biaya kerusakan, serta biaya pemulihan belum sepenuhnya disajikan dalam bentuk informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga kepada

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya publik. Pengelolaan sumber daya kelautan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sehingga transparansi informasi mengenai pengelolaannya menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penerapan *blue accounting* dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas kualitas informasi yang disampaikan kepada stakeholder, khususnya dengan mengintegrasikan informasi keuangan, ekonomi, dan ekologis (Sari dan Nugraha, 2023).

Dalam aspek pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat masih berfokus pada aspek keuangan dan kepatuhan administratif. Aspek lingkungan belum menjadi fokus utama dalam evaluasi pengelolaan sumber daya kelautan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang berjalan masih lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibandingkan pertanggungjawaban terhadap kondisi dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Padahal, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan konsekuensi keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak ekologis yang perlu dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sejalan dengan Wijaya dan Kusuma (2023) yang menekankan pentingnya memasukkan aspek lingkungan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aspek lingkungan dalam mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui penyediaan indikator kinerja lingkungan, evaluasi biaya perlindungan dan pemulihan lingkungan, serta pemantauan perubahan kondisi sumber daya kelautan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaian penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga berdasarkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya yang dikelolanya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan antara pelaksanaan program pengelolaan sumber daya kelautan dan integrasinya ke dalam sistem akuntansi serta pelaporan pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian Rahmawati et al. (2024) memetakan perkembangan akuntansi lingkungan sektor publik melalui tinjauan literatur sistematis, sedangkan Kotze dan Bohler-Muller (2024) menyoroti pentingnya memasukkan dimensi sosial dan inklusivitas ke dalam kerangka *ocean accounting*. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya perluasan cakupan informasi akuntansi lingkungan dan kelautan, tetapi memiliki fokus yang berbeda dari kajian empiris mengenai praktik pencatatan dan pelaporan pada instansi pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan bukti empiris dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat bahwa pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi informasi ekologis, biaya lingkungan, dan nilai ekonomi sumber daya kelautan ke dalam sistem pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah memperjelas kesenjangan implementasi *blue accounting* pada tingkat kelembagaan pemerintah daerah serta menunjukkan pentingnya penguatan integrasi informasi keuangan, ekonomi, dan ekologis untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan.

Seluruh informan menyatakan bahwa penerapan *blue accounting* memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan melalui integrasi informasi ekonomi dan ekologis dalam sistem pelaporan. Integrasi tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sumber daya laut, nilai ekonomi sumber daya, biaya perlindungan dan pemulihan lingkungan, serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Potensi tersebut sejalan dengan Rahmawati et al. (2024) dan Tommasetti et al. (2023) yang membahas pentingnya pengembangan akuntansi lingkungan dalam sektor publik, serta Kotze dan Bohler-Muller (2024) yang menekankan perlunya memperhatikan dimensi sosial dan inklusivitas dalam kerangka *ocean accounting*. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengembangan *blue accounting* di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat memerlukan dukungan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pendataan dan integrasi sistem informasi, serta koordinasi antarinstansi. Langkah-langkah tersebut berpotensi memperkuat ketersediaan informasi keuangan, ekonomi, dan ekologis sebagai dasar pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kelautan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas kelautan dan perikanan maupun pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan mekanisme pencatatan biaya lingkungan, integrasi data sumber daya kelautan, dan pelaporan yang lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik serta kapasitas kelembagaan masing-masing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan *blue accounting* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terletak pada belum terhubungnya kegiatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang mampu menggambarkan aspek keuangan, ekonomi, dan ekologis secara terpadu. Meskipun mekanisme pertanggungjawaban keuangan telah berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, informasi mengenai kondisi dan nilai sumber daya kelautan serta biaya perlindungan dan pemulihan lingkungan belum tersaji secara sistematis. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kompetensi aparatur, ketersediaan data, dukungan regulasi, anggaran, dan integrasi sistem informasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan program konservasi belum dengan sendirinya mencerminkan penerapan *blue accounting*, sehingga penguatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan pengembangan mekanisme pengukuran dan pelaporan yang menghubungkan informasi keuangan dengan kondisi ekologis serta didukung koordinasi antarinstansi.

REFERENSI

Aptasari, F. W. (2025). Akuntansi dialogis dalam pengelolaan sumber daya kelautan untuk ekonomi biru berkelanjutan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.35837/subs.v9i2.3299>

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Ekawati, W., Anfadilah, F. Z., & Firjatullah, A. (2025). Ocean accounting: Kebutuhan untuk mendukung koordinasi kebijakan di bidang perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(3), 1320–1325. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0703.1320-1325>
- Gacutan, J., Galparsoro, I., Pınarbaşı, K., Murillas, A., Adewumi, I. J., Praphotjanaporn, T., Johnston, E. L., Findlay, K. P., & Milligan, B. M. (2022). Marine spatial planning and ocean accounting: Synergistic tools enhancing integration in ocean governance. *Marine Policy*, 136, 104936. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104936>
- Gacutan, J., Lal, K. K., Herath, S., Lantz, C., Taylor, M. D., & Milligan, B. M. (2022). Using Ocean Accounting towards an integrated assessment of ecosystem services and benefits within a coastal lake. *One Ecosystem*, 7, e81855. <https://doi.org/10.3897/oneeco.7.e81855>
- Gacutan, J., Pınarbaşı, K., Agbaglah, M., Bradley, C., Galparsoro, I., Murillas, A., Adewumi, I. J., Praphotjanaporn, T., Bordt, M., Findlay, K. P., Lantz, C., & Milligan, B. M. (2022). The emerging intersection between marine spatial planning and ocean accounting: A global review and case studies. *Marine Policy*, 140, 105055. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105055>
- Gacutan, J., Loureiro, T. G., Milligan, B. M., Praphotjanaporn, T., Findlay, K. P., & Adewumi, I. J. (2023). Ocean accounts as an approach to foster, monitor, and report progress towards sustainable development in a changing ocean – The Systems and Flows Model. *Marine Policy*, 154, 105668. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105668>
- Hartmann, Z., & Thornton, J. L. (2025). Sustainability, well-being and health: Towards a cultural metric approach in ocean accounting. *Journal of the Indian Ocean Region*, 20(2), 119–131. <https://doi.org/10.1080/19480881.2025.2458342>
- Kotze, J. S., & Bohler-Muller, N. (2024). Counting women? Gendered sustainability and inclusivity for an ocean accounting framework. *Journal of the Indian Ocean Region*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/19480881.2024.2373514>
- Larre, A. A., Haq, D. A., & Jowei, Y. I. (2025). Urgensi ocean accounting untuk menyelamatkan keberlanjutan perikanan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(2), 1226–1231. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1226-1231>
- Nguyen, H. H. (2024). Ocean accounting: International experiences and policy implications for Vietnam. *Journal of State Management*, 31(12), 73–79. <https://doi.org/10.59394/JSM.26>

- Rahmawati, E., Nazaruddin, I., Widiastuti, H., Sofyani, H., & Kholid, A. W. N. (2024). Environmental accounting in public sector: Systematic literature review. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 75–90. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.21344>
- Rahayu, N. P. P. A., Sudana, I. M., & Yintayani, N. N. (2022). Analysis of the application of environmental accounting as one of social accountability at The ONE Legian Hotel. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(2), 140–145. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v5i2.140-145>
- Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). Manajemen sumber daya kelautan dalam implementasi blue economy: Peluang dan tantangan di Indonesia. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3645–3652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7567>
- Rizqiya, A. R., Sidhikah, D., & Awaluddin. (2025). Mendorong keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia melalui penerapan ocean accounting. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(2), 1283–1288. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1283-1288>
- Sulistiyanto, A. R. P., Masni, & Pratiwi, S. D. (2025). Mewujudkan ekonomi biru yang akuntabel: Integrasi ocean accounting dalam strategi pembangunan kelautan Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 7(2), 1277–1282. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1277-1282>
- Suwarno, T. E., Laoli, V., & Simorangkir, E. N. (2025). Akuntansi biru sebagai pilar pembangunan ekonomi maritim untuk Indonesia Emas 2045. *Jurnal Media Akademik*, 3(8), 1-10. <https://doi.org/10.62281/ze25yw52>
- Tommasetti, A., Maione, G., Bignardi, A., & Lentini, P. (2023). Environmental accounting in the public sector: A systematic literature review. *International Journal of Business Environment*, 14(2), 164–182. <https://doi.org/10.1504/IJBE.2023.129907>
- Yanto, E., Anirwan, A., Nrugoho, T. C., & Irfan, I. (2026). Blue governance dan tata kelola maritim adaptif di Indonesia: Kajian literatur integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 6(1), 20–31. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v6i1.960>